

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang menyeluruh dan terjadi di seluruh belahan dunia. Hal tersebut bisa terjadi di negara maju maupun negara berkembang dan terlepas dari agama maupun ideologi politik (Wilson, 2014). Isu mengenai ketidaksetaraan gender sendiri menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5 yaitu *Achieve gender equality and empower all women and girls*. Ketidaksetaraan gender sendiri masih mengakar di setiap lingkup kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya membuat banyak perempuan yang ikut menderita akibat kurangnya akses yang mereka dapatkan terhadap pekerjaan dan upah dan layak, terlebih lagi diskriminasi yang masih sering didapat oleh perempuan. Melalui SDGs nomor 5 ini PBB bersama *UN Women* berusaha untuk memajukan kesetaraan gender (United Nations, 2024).

Menurut analisis data prevalensi tahun 2018 oleh World Health Organization dari tahun 2000-2018 di 161 negara dan wilayah, ditemukan bahwa hampir 1 dari 3 atau 30 persen perempuan telah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan maupun yang bukan pasangannya (WHO, 2024).

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus terhadap salah satu negara yang berada di kawasan Amerika Latin yaitu Meksiko. Negara ini merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin setelah Brazil dan Argentina. Meksiko

sendiri merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang utama di Amerika Latin (Cline, 2024). Posisi perempuan di Meksiko saat ini mulai mengalami kemajuan khususnya dalam hak dan representasi hukum dimana adanya reformasi politik pada tahun 2014, menyebabkan perempuan menduduki sekitar 48 persen kursi parlemen hingga awal tahun 2021 dan di tahun 2024 ini terdapat dua kandidat presiden perempuan dalam pemilihan umum (Camacho & Ajidahun, 2024). Meskipun adanya kemajuan dalam posisi wanita dalam representasi hukum, perempuan di Meksiko masih kesulitan untuk dalam menghadapi kekerasan berbasis gender. Salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang paling ekstrem yang terjadi di Meksiko yaitu femisida.

Istilah *femicide* muncul pertama kali dicetuskan oleh gerakan feminisme pada tahun 1970-an, dimana munculnya istilah *femicide* yang secara eksklusif mengacu pada pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan oleh laki-laki. Namun, definisi *femicide* pun sejak saat itu semakin diperluas yaitu mencakup semua pembunuhan terhadap wanita (Nowak, 2012). Istilah *femicide* sendiri diperkenalkan pertama kali oleh seorang aktivis feminisme pada tahun 1976 yaitu Diana Russell (Rodriguez, 2020). Russell mendefinisikan *femicide* sebagai tindakan pembunuhan oleh laki-laki terhadap perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan (Douglas, 2001).

World Health Organization sendiri mendefinisikan *femicide* sebagai “pembunuhan yang disengaja terhadap wanita karena mereka adalah wanita”. Sebagian besar kasus *femicide* di Meksiko ini dididasi oleh tindakan

kekerasan dan penganiayaan. Data mengenai korban *femicide* di Meksiko sendiri mulai dihitung secara resmi pada tahun 2012, dimana pada tahun tersebut jumlah insiden pembunuhan wanita di Meksiko menempatkan negara ini di urutan ke-16 di dunia (Sandin, 2020).

Isu mengenai *femicide* yang terjadi di Meksiko ini tentunya sangat menarik perhatian domestik dan internasional. Dapat dilihat bahwa kesetaraan gender di Meksiko sendiri masih sulit tercapai dan juga pelanggaran HAM terhadap kaum wanita yang tentunya sangat menarik perhatian internasional. Tingginya tingkat pembunuhan terhadap wanita ini yaitu dikarenakan budaya patriarki atau yang lebih dikenal sebagai budaya *machismo* yang sangat dijunjung tinggi. Definisi dari *Machismo* sendiri mengacu terhadap sikap atau konsepsi bahwa laki-laki pada dasarnya lebih unggul dari perempuan. Budaya *Machismo* ini juga memperkuat gagasan tentang perempuan yang dianggap sebagai warga negara kelas dua dalam mendapat hak dan kesempatannya, bahkan di dalam kebijakan publik. Dapat dilihat dengan kentalnya budaya ini, perempuan sering direndahkan, dirusak di dalam rumah tangga, di jalanan, sekolah, maupun di tempat kerja. Meksiko sendiri juga termasuk salah satu negara dengan kesenjangan upah gender terbesar. (Ortiz, 2018)

Selain budaya patriarki yang sangat kental di negara ini, tingginya isu *femicide* di Meksiko juga disebabkan oleh adanya sindikat perdagangan obat-obatan terlarang yang merajalela di negara tersebut. Maraknya sindikat perdagangan narkoba di Meksiko ini tentunya membuat pemerintah Meksiko mencari cara untuk menekan jumlah sindikat tersebut dan pemerintah Meksiko

sendiri melakukan perang terhadap narkoba yang dimulai sejak tahun 2006 (BBC, 2020).

Isu *femicide* yang terjadi di Meksiko ini juga mendapat banyak kecaman dari pengamat baik di Meksiko maupun di luar negeri. Melihat tingginya kasus *femicide* di Meksiko sendiri membuat banyak protes terjadi yang ditujukan terhadap pemerintahan Meksiko. Protes ini sendiri dilakukan oleh para wanita terhadap pemerintahan untuk meminta penjaminan terhadap HAM mereka yang sangat terancam di negara tersebut. Salah satu protes besar-besaran yang pernah terjadi di Meksiko terkait isu *femicide* ini yaitu protes yang terjadi pada 8 Maret 2021. Protes ini sendiri bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Tindakan protes ini sendiri berubah menjadi tindakan kekerasan, dimana para yang sedang melakukan protes bentrok dengan *riot police* yang ditempatkan di luar *National Palace*, yang merupakan kediaman dari Presiden *Andrés Manuel López Obrador*. Protes ini sendiri dilakukan dengan banyak orang membawa slogan-slogan yang bertuliskan nama-nama perempuan yang menjadi korban dari *femicide* ini. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 1000 wanita di Meksiko yang menjadi korban *femicide*. Salah satu kasus yang paling brutal menimpa seseorang bernama Ingrid Escamila dengan usia 25 tahun pada Februari 2020, Ingrid sendiri ditikam sampai mati, setelah itu dimutilasi dan sebagian dari badannya dikuliti. Terdapat sekitar 10 korban pembunuhan terhadap wanita per-harinya di Meksiko, dimana jumlah ini sendiri meningkat sekitar 10 persen dari tahun 2018. (Berger, 2021).

Banyaknya protes terhadap pemerintah Meksiko dan masih tingginya jumlah kasus femisida, dapat diamati bahwa pemerintahan Meksiko masih belum berhasil untuk menangani isu mengenai kekerasan berbasis gender khususnya *femicide* di lingkup domestik. Selain itu, pemerintahan Meksiko sendiri sebelumnya telah membuat beberapa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kasus *femicide* di dalam negeri. Namun, Meksiko masih gagal untuk menangani dan memberantas femisida. Kegagalan Meksiko untuk menangani isu *femicide* sendiri tentunya dikarenakan berbagai tantangan salah satunya seperti budaya patriarki atau lebih dikenal sebagai *Machismo*. Walaupun Meksiko masih dianggap belum berhasil untuk menangani isu *femicide* di dalam negeri, Meksiko sendiri merupakan salah satu negara yang aktif untuk aktif ikut serta dan mempromosikan mengenai kesetaraan gender di lingkup internasional. Meksiko sendiri merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Selain itu, kegiatan aktif Meksiko di lingkup Internasional yaitu dengan pengadopsian *Feminist Foreign Policy*. Pada Januari 2020, *Gobierno De Mexico* atau pemerintahan Meksiko mengesahkan pengadopsian *feminist foreign policy*. Meksiko sendiri menjadi negara pertama yang ada di antara negara-negara di Amerika Latin dalam mengadopsi kebijakan luar negeri feminis ini (Deslandes, 2020). Selain itu, banyak kegiatan aktif yang diikuti oleh Meksiko dalam menyuarakan kesetaraan gender di lingkup internasional. Melihat aktifnya pemerintahan Meksiko untuk mempromosikan kesetaraan gender di lingkup internasional, dapat menjadi

strategi yang dapat memperbaiki citra negara mereka dimata global. Keadaan ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di lingkup domestik, dimana berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Meksiko dalam menangani isu kekerasan gender namun kebijakan tersebut masih belum dapat dijalankan dengan baik, sehingga kasus femisida di Meksiko ini masih sulit untuk dituntaskan.

1.2 Perumusan Masalah

“Mengapa *Feminist Foreign Policy* yang diadopsi oleh Meksiko sebagai strategi *nation branding* tidak sesuai dengan tindakan pemerintah Meksiko dalam menangani kasus femisida?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang didasarkan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana Meksiko dalam menangani isu gender di lingkup domestik dan lingkup internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan apa alasan dari ketidaksesuaian dari FFP yang diadopsi dengan tindakan pemerintah Meksiko dalam menangani kasus femisida.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kegunaan akademik dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu Hubungan Internasional kedepannya, dan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik terkait isu gender di Meksiko.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca khususnya mengenai ketidaksesuaian tindakan pemerintah Meksiko dalam menangani isu femisida dengan nilai-nilai feminis yang tercantum dalam FFP yang telah diadopsi oleh Meksiko.

1.5 Studi Pustaka

Dalam proses penulisan dari penelitian ini, penulis melakukan studi literatur mengenai penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu yang penulis bawa. Penelitian pertama merupakan tulisan dari Mariamne Crippa Méndez dan Adriana Rodríguez Barraza di tahun 2022 yang berjudul “*An Interpretation of Femicide in Mexico: Violence and Human Rights*”. Penelitian tersebut membahas mengenai masalah kekerasan gender di Meksiko yang mengkhawatirkan, dimana versi yang paling ekstrem merupakan *femicide*, konsep ini dikemukakan oleh Diana Russell yang menyatakan *femicide* merupakan pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki. Penulis

dalam mengkaji permasalahan *femicide* di Meksiko melalui tiga sumbu yaitu: kekerasan, *femicide*, dan hak asasi manusia. Penelitian tersebut menafsirkan fenomena femisida yang terjadi di Meksiko dengan menggunakan teori kekerasan dari Johan Galtung, yang mana kekerasan dapat berupa penghinaan, pengingkaran, dan hambatan terhadap kebutuhan dasar manusia. Galtung menyatakan adanya tiga dimensi kekerasan yaitu: langsung, kultural, dan struktural. Penelitian ini berfokus terhadap kekerasan kultural dan struktural. Kekerasan budaya dan struktural di Meksiko dapat terlihat dari adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, seperti kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki, operasi ginekologi, dan sterilisasi menjadi kewajiban ibu. Adanya budaya patriarki yang melekat di Meksiko ini mempengaruhi kesenjangan dan kekerasan terjadi, dimana laki-laki merasa lebih dominan dan semena-mena melakukan kekerasan untuk mempertahankan supremasi mereka (Mendez & Barraza, 2022).

Penelitian kedua ditulis oleh Rohanti Mukti Mubarak, Linda Dwi Eriyanti, dan Muhammad Iqbal pada tahun 2021 yang berjudul “Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (*The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis*)”. Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap kegagalan pemerintahan Meksiko dalam menangani krisis *femicide* di dalam negeri. Dapat dilihat di dalam penelitian ini bahwa pemerintahan Meksiko sendiri telah membuat berbagai kebijakan mengenai pemberantasan kasus kekerasan pada wanita, namun kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya. Penelitian ini menggunakan teori feminis

sosialis yang mana teori tersebut menyatakan bahwa adanya ketidaksetaraan gender ini diakibatkan adanya interaksi antara sistem kapitalisme dan patriarki yang mengakar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *policy failure* untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Meksiko gagal untuk mengatasi krisis *femicide* di dalam negara. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa gagalnya pemerintah Meksiko untuk mengatasi krisis *femicide* ini diakibatkan adanya budaya *machismo* yang mengakar hingga saat ini dan adanya bisnis kartel narkoba yang banyak beredar di Meksiko. Implementasi dari nilai-nilai budaya *machismo* ini menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang wajar. Kegagalan pemerintah dalam menangani aktivitas kartel narkoba juga menyebabkan meningkatkan tingkat kekerasan khususnya terhadap perempuan di Meksiko. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegagalan pemerintahan Meksiko dalam menangani isu femisida dikarenakan faktor domestik seperti budaya machsimo yang terus mengakar dan kelompok kartel narkoba yang merajalela, sehingga kasus kekerasan gender dianggap suatu hal yang wajar (Mubarok, Eriyanti, & Iqbal, 2021).

Penelitian ketiga ditulis oleh Daniela Philipson Garcia dan Ana Velasco pada tahun 2022 yang berjudul “*Feminist Foreign Policy: A Bridge Between the Global and Local*”. Penelitian in membahas mengenai penerapan kebijakan luar negeri feminis oleh Meksiko, dimana ada munculnya ketidakselarasan setelah pengadopsian kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari aktifnya pemerintah Meksiko dalam mempromosikan nilai-nilai feminis dilingkup internasional, namun presiden Meksiko Andrés Manuel López

Obrador menenatang aktivis feminis di dalam negeri dan juga meremehkan kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di dalam negeri. Penulis dalam penelitian ini berargumen bahwa dengan pengadopsian FFP ini harusnya dapat menjembatani antara luar negeri dan domestik. Penulis juga berpendapat bahwa FFP harus diselaraskan dengan tingkat lokal. Kebijakan luar negeri feminis dari negara berkembang dapat menjadi suatu platform baru untuk memajukan kesetaraan gender dan berpotensi untuk mengubah pembuatan kebijakan yang radikal menjadi global. Jadi, peneliti disini berpendapat bahwa adanya pengadopsian FFP ini harusnya dapat menjembatani antara lokal dan global, dimana isu kekerasan gender yang terjadi di domestik juga dapat diatasi. (Garcia & Velasco, 2022).

Penelitian keempat berjudul “*Continuous Yet Contentious: United Nations Agencies Roles and Mexico’s Adoption of Women’s Rights Protection Against Femicide (2018-2022)*”, ditulis oleh Witri Elvianti dan Nanda Satria. Penelitian ini membahas mengenai isu kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang merupakan isu yang sangat serius di Meksiko, mengingat banyaknya korban yang terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keikutsertaan badan-badan PBB dalam mendorong perlindungan HAM dan mengatasi kekerasan berbasis gender di Meksiko. Peneliti berpendapat bahwa isu *femicide* di Meksiko ini dapat diatasi oleh peran aktif dari lembaga internasional yaitu PBB dan badan-badannya. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teori moralitas yang mengacu pada liberalisme, dimana teori ini memandang bahwa kebijakan luar negeri

suatu negara harus koheren dan selaras dengan kepentingan dan etika kehidupan manusia. PBB dan sub lembaganya yang bekerja di Meksiko telah memulai beberapa upaya untuk memastikan standar moral yang penting untuk melindungi hak-hak perempuan. OHCHR (*Office of the High Commissioner for Human Rights*) bersama dengan badan-badan PBB lainnya seperti *UN Women* dan UNDP, telah melaksanakan peran mereka untuk memfasilitasi masyarakat sipil Meksiko melalui forum penasehat untuk membentuk advokasi mereka terhadap korban kekerasan berbasis gender dan pembunuhan terhadap perempuan atau *femicide* (Elvianti & Satria, 2023).

Penelitian kelima ditulis oleh Marisa Meno pada tahun 2017 yang berjudul "*Femicide in Juarez, Mexico*". Penelitian ini membahas mengenai kejadian tragis yang memakan banyak wanita sebagai korban di Juarez, Meksiko pada tahun 2003 dan faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut terjadi. Kasus *femicide* di Juarez mulai meningkat mulai tahun 1993, dimana pada masa itu banyak eksploitasi tenaga kerja oleh pabrik-pabrik asing yang berada di perbatasan Meksiko atau disebut sebagai *maquiladora*. Selain eksploitasi tenaga kerja yang menyebabkan peningkatan *femicide* di Juarez, adanya kartel-kartel narkoba yang meningkat jumlahnya di Meksiko juga menyebabkan tingkat kejahatan meningkat dan berkelanjutan dengan meningkatkannya *femicide*. Selain itu, budaya *machismo* yang melekat di negara tersebut juga menjadi penyebab meningkatnya kasus *femicide* di Meksiko, khususnya di Juarez. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor global seperti eksploitasi pekerja oleh pabrik milik negara asing dan faktor domestik seperti

budaya machismo dan peningkatan kelompok kartel narkoba sangat berperan besar dalam peningkatan kasus *femicide* di Juarez. (Meno, 2017).

Penelitian keenam berjudul “*Machismo, Femicides, and Child’s Play: Gender Violence in Mexico*” yang ditulis oleh Ines De La Morena. Penelitian tersebut berfokus pada isu kekerasan gender yang terjadi di Meksiko khususnya pembunuhan terhadap perempuan atau *femicide*. Kekerasan gender di Meksiko sudah terjadi sejak lama, tepatnya dimulai pada masa penjajahan oleh Spanyol. Pada masa itu, banyak perempuan pribumi yang diperkosa oleh para penjajah. Budaya machismo juga lahir bertepatan dengan masa itu, dimana pada masa tersebut sebagian besar hukum Meksiko mengacu atau terinspirasi dari Undang-Undang perdata Prancis yang mana mencantumkan bahwa perempuan itu ada tanggungan laki-laki di dalam semua aspek kehidupan, oleh karena itu laki-laki mengasumsikan bahwa peran mereka lebih dominan di dalam kehidupan. Adanya budaya machismo inilah yang membuka jalan terhadap kekerasan berbasis gender yang terjadi di Meksiko. Sistem peradilan yang tidak sistematis juga menjadi alasan mengapa tingkat kekerasan gender di Meksiko masih banyak terjadi hingga masa sekarang (Morena, 2020).

Maka dari itu, apabila menilik penelitian-penelitian sebelumnya, persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai kekerasan berbasis gender khususnya *femicide* yang ada di Meksiko. Penulis akan menjawab pertanyaan pada rumusan latar belakang masalah dengan menggunakan konsep neorealisme yang menjelaskan

bagaimana Meksiko sebagai aktor utama memutuskan untuk mengadopsi FFP dan menggunakan konsep *nation branding* yang menggambarkan strategi Meksiko untuk membangun citra baik.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Neorealisme

Penelitian ini menggunakan teori neorealis. Neorealisme sendiri merupakan suatu perbaharuan dari teori sebelumnya yaitu realisme klasik. Aliran realisme sendiri telah mendominasi studi akademik hubungan internasional sejak akhir Perang Dunia II. Menurut teori realisme, negara itu berada di dalam sistem internasional anarkis dimana negara pada akhirnya hanya akan bergantung pada kemampuan dan *power* yang mereka miliki untuk memenuhi kepentingan nasional yang negara itu miliki. Realisme klasik dipersatukan terutama oleh apa yang mereka lawan. Menurut Morgenthau yang merupakan salah satu tokoh terkenal dalam aliran realisme menyatakan bahwa tujuan utama dari suatu negara itu adalah kekuasaan (Duncan, 2023).

Teori neorealisme ini memperbaiki beberapa aspek yang ada di dalam teori realisme. Neorealisme juga merupakan upaya untuk menafsirkan beberapa pemahaman realisme klasik ke dalam bahasa dan metode ilmu sosial modern. Kenneth Waltz yang merupakan pencetus neorealisme berpendapat bahwa argumen realis klasik mengenai intitusi domestik, kualitas diplomasi dan tata negara, moral nasional, dan juga mengenai aspek sifat dasar manusia atau *human nature* yang merupakan penyebab konflik, hal tersebut sebagian

besar tidak relevan. Waltz memahami bahwa negara lah yang merupakan aktor rasional kesatuan (Duncan, 2023).

Teori neorealis dibentuk di atas perbedaan yang tegas antara politik nasional dan politik internasional. Politik internasional sendiri memiliki ranah atau cakupan yang terbatas dan berbeda dari politik nasional. Untuk membangun teori ini, sistem internasional ini diasumsikan terdiri dari dua elemen yaitu struktur sistem dan negara sebagai unit yang bertindak dan berinteraksi di dalam suatu sistem. Asumsi bahwa negara adalah aktor yang paling penting dan relevan dalam politik internasional mendasari teori ini. Perilaku atau tindakan dari suatu negara tentunya didasari dari motivasi dan kepentingan negara tersebut, oleh karena itu teori neoralis mengasumsikan bahwa negara-negara akan mencari kelangsungan hidup mereka secara maksimal agar dapat tetap bertahan dan menjadi dominan di sistem internasional (Spindler, 2013).

Berdasarkan buku yang berjudul "*Theory of International Politics*" yang ditulis oleh *Kenneth Waltz*, teori neorealisme itu identik dengan sistem internasional sebagai penentu dari perilaku suatu negara. Sistem adalah variabel penentu, menurut teori ini pola keseimbangan kekuatan dari negara-negara besar dapat menentukan dan mempengaruhi perilaku atau kebijakan dari suatu negara. Menurut Waltz, sistem internasional itu bersifat anarki. Anarki sendiri berarti bahwa sistem internasional adalah sistem swadaya. Anarki yang dimaksud oleh Waltz ini yaitu tidak ada otoritas atau pihak yang lebih tinggi yang dapat menegakkan aturan atas masing-masing negara. Negara

bertindak berdasarkan kekuatan yang mereka miliki, dimana negara bertindak dengan tujuan bertahan hidup dan interaksi dari suatu negara dengan negara lain mencerminkan keinginan dari suatu negara yang ingin bertahan hidup (Waltz, 1979).

Teori neorealis yang dirumuskan oleh Waltz disebut sebagai level analisis struktur. Waltz berpendapat bahwa negara-negara besar memiliki kapabilitas dan kapasitas yang dapat mereka gunakan untuk mengubah sistem internasional. Ia sendiri mengakui adanya aktor lain selain negara, namun negara menjadi satu-satunya aktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam membentuk suatu aturan. Waltz berasumsi bahwa negara berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, dimana kelangsungan hidup merupakan prasyarat penting yang mana merupakan landasan dari teori ini. Beberapa negara lebih memilih bertahan hidup daripada mencapai tujuan lain yang dapat diperoleh dalam jangka waktu pendek dan bertindak dengan efisiensi relatif untuk memperoleh tujuan itu (Waltz, 1979).

Menurut Waltz, level analisis merupakan faktor-faktor penjelas yang akan menentukan tindakan dari aktor. Jika melihat dari level analisisnya, pada dasarnya teori neorealisme ini menggunakan tiga level analisis dalam menjelaskan kebijakan dari aktor. Pertama yaitu level analisis struktur (*system-level analysis*), level analisis ini memberikan pola umum dari tingkah laku negara dan juga adanya ketergantungan di antara mereka. Level analisis ini ini meyakini bahwa sistem internasional mempengaruhi tindakan aktor. Kedua, yaitu politik domestik (*state-level analysis*), pada level analisis ini perilaku

suatu negara itu dipengaruhi atau ditentukan dari faktor-faktor internal dalam negara tersebut. Ketiga yaitu individu (*individual level system*), pada level analisis ini berfokus terhadap manusia sebagai aktor, dimana terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan (Olivia, 2013).

Berdasarkan teori sebelumnya yaitu neorealisme dapat dilihat bahwa negara sebagai aktor utama berhak untuk memutuskan apapun sesuai dengan keinginan yang akan dituju. Berbagai macam upaya dilakukan oleh negara sebagai aktor supaya tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. Negara akan melakukan apapun agar dipandang lebih baik oleh pihak manapun, salah satu bentuk usaha untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan melalui konsep *nation branding*. Dimana negara memperbaiki atau membuat citra negara mereka agar dipandang lebih baik.

1.6.2 Nation Branding

Penelitian ini juga menggunakan konsep *Nation Branding*. Setiap negara tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, salah satu nya melalui daya yang dimiliki oleh negara. Kemampuan untuk mencapai tujuan ini dapat disebut juga sebagai *Soft Power*, pernyataan tersebut disampaikan oleh *Joseph Nye*. Nye sendiri berpendapat bahwa *Soft Power* dapat timbul dari daya tarik suatu negara bisa dari budaya, cita-cita politik, maupun kebijakan suatu negara. Dapat dilihat bahwa *nation branding* ini dapat menjadi salah satu konsep yang dapat dimanfaatkan sebagai *soft power* dari suatu negara (Yamin & Kristiawan, 2020).

Nation Branding merupakan teknik branding pada suatu negara yang diterapkan untuk membentuk atau memperbaiki citra atau reputasi dari suatu negara, tentunya dengan tujuan meningkatkan reputasi negara di panggung internasional. *Nation Branding* bisa dilakukan melalui berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, maupun budaya. Untuk mempromosikan kekuatan dan nilai-nilai dari suatu bangsa melibatkan upaya pemasaran dan juga komunikasi yang strategis, hal ini tentunya dengan tujuan untuk menarik perhatian berbagai hal seperti pariwisata, investasi, dan pengaruh politik.

Penerapan konsep *nation branding* pada suatu negara merupakan fenomena yang relatif baru dan semakin hari frekuensi nya juga meningkat, hal ini mengingat persaingan global atau antar negara yang dihadapi suatu negara di lingkup domestik maupun eksternal. Negara-negara saat ini semakin sadar untuk menyempurnakan citra atau branding negara mereka untuk mendapat pengakuan, terutama terdapat tiga tujuan utama suatu negara menyempurnakan citra mereka yaitu: untuk menarik wisatawan, untuk mendatangkan investasi dalam negeri, dan untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, *nation branding* sendiri dapat digunakan untuk membantu menghapus kesalahpahaman mengenai suatu hal dari suatu negara dan melalui *nation branding* nantinya negara tersebut dapat memposisikan negara nya menjadi lebih baik. Melalui *nation branding* ini, suatu negara dapat mempromosikan citra positif negara mereka sehingga dapat menetapkan identitas bangsanya, meningkatkan aktivitas ekspor produk, dan menarik investor dan wisatawan dari luar negeri (Dinnie, 2008).

Menurut salah seorang ahli di bidang *nation branding* Simon Anholt, ia pertama kali menuliskan gagasan mengenai nation branding di tahun 1996. Pendapat awal dari Anholt mengenai gagasannya tersebut yaitu reputasi dari suatu negara itu berfungsi seperti citra dari suatu merek atau perusahaan dan hal tersebut sama pentingnya bagi kemajuan dan kemakmuran dari suatu negara (Dinnie, 2008: 23). Terdapat dua konsep utama yang memisahkan *nation branding* dari bentuk diplomasi publik yang lebih tradisional. Pertama, Anholt sendiri berpendapat bahwa pada masa sekarang negara-negara mulai lebih sadar bahwa citra dari negara merupakan suatu aset yang penting. Memahami penilaian dapat membantu negara untuk lebih memahami investasi yang mereka lakukan sesuai dengan citra yang mereka bangun. Perubahan kedua, merupakan fokus pada aspek perilaku dalam mengelola citra suatu bangsa. Anholt sendiri menyarankan agar para pejabat dari pemerintah, organisasi nirlaba, dan dunia bisnis dapat berkolaborasi dengan baik supaya nantinya dapat memastikan pesan-pesan yang disampaikan oleh suatu negara mewakili apa yang mereka lihat sebagai tujuan bersama yang mendasar dari negara mereka. Anholt sendiri membagi gagasan dari *nation branding* dalam enam bagian, yaitu pariwisata, ekspor, pemerintahan, masyarakat, budaya dan warisan bersejarah, dan imigrasi (Teslik, 2007).

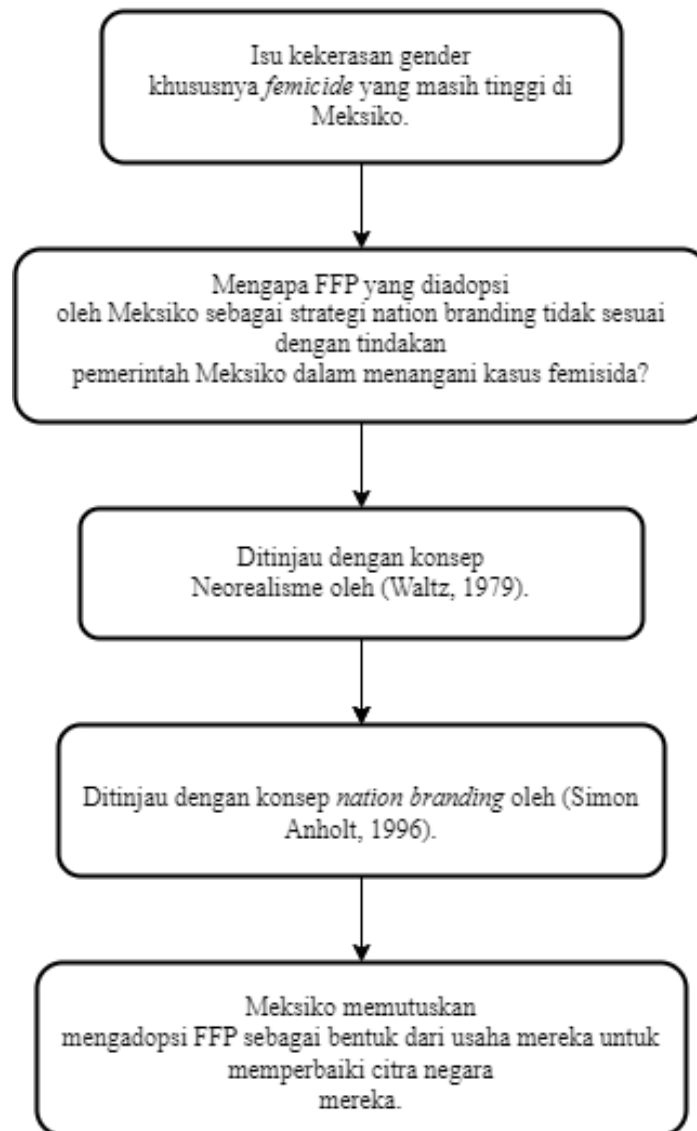
Sebagian besar negara memperbaiki atau membangun citra negara mereka dengan melakukan kerja sama dengan konsultan. Terdapat berbagai cara untuk suatu negara membangun citra mereka, salah satunya yaitu dalam bentuk *campaign* dengan melihatkan citra baik atau sisi positif negara.

Campaign ini dapat dilakukan dengan kerjasama antar negara dengan lembaga berita. Melalui kerjasama tersebut nantinya suatu negara dapat membangun citra negara mereka agar dipandang baik (Teslik, 2007).

1.6.3 Bagan Alur Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disusun bagan alur pemikiran yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Bagan alur Pemikiran Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Neorealisme

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pengertian neorealisme dari Kenneth Waltz (1979). Dimana menurut Waltz, neorealisme merupakan teori hubungan internasional yang menyatakan bahwa faktor paling penting dalam hubungan internasional merupakan *power*. Teori ini juga menekankan mengenai perilaku negara dalam sistem internasional. Berdasarkan teori ini, keseimbangan kekuatan negara-negara besar dapat menentukan dan mempengaruhi perilaku dan kebijakan dari suatu negara (Lobell, 2017).

1.7.1.2 Nation Branding

Definisi dari *nation branding* dalam penelitian ini diambil dari pengertian oleh Simon Anholt (1996), yaitu proses pengelolaan reputasi dan citra suatu negara untuk meningkatkan pengaruh, kesejahteraan, dan pemerintahan yang lebih efektif. Teknik branding ini diterapkan oleh negara untuk membangun maupun memperbaiki citra negara mereka agar dipandang lebih baik (Anholt, 2013).

1.7.1.3 Structural Violence

Definisi dari kejahatan struktural dalam penelitian ini diambil dari pengertian oleh Johan Galtung (1969), merujuk pada bentuk kekerasan yang

terjadi karena ketidakadilan struktural atau institusi sosial yang dapat mencegah individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan struktural dapat menimbulkan kerugian dan risiko bagi suatu populasi tertentu. Kekerasan struktural bersifat diam atau tidak terlihat dan pada dasarnya bersifat statis hal ini dikarenakan kekerasan tersebut tertanam dalam struktur sosial dan menjadi hal yang wajar terjadi disekitar kita, sehingga bentuk kekerasan ini sulit untuk diidentifikasi (Galtung, 1969).

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Neorealisme

Dalam kasus ini Meksiko sebagai aktor utama berhak menentukan apa yang ingin mereka tuju. Adanya sistem internasional yang terbentuk dari kekuatan negara-negara besar yang turut mengadopsi FFP membuat Meksiko memiliki keputusan untuk turut serta mengadopsi FFP. Pengadopsian FFP ini membuat Meksiko menjadi lebih aktif mempromosikan nilai-nilai feminis dan kesetaraan gender di lingkup internasional. Untuk itu, penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut.

- a. Apa faktor yang mendorong Meksiko memutuskan untuk mengadopsi *Feminist Foreign Policy*?
- b. Strategi seperti apa yang dilakukan pemerintahan Meksiko setelah mengadopsi FFP?
- c. Apakah dengan pengadopsian FFP dapat menjadi solusi permasalahan kekerasan gender di Meksiko?

1.7.2.2 *Nation Branding*

Konsep *nation branding* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Meksiko menggunakan FFP untuk memperbaiki citra negara dan membangun citra yang baru. Oleh karena itu, penulis merumuskan definisi operasional *nation branding* untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Apa faktor yang mendorong Meksiko untuk menggunakan FFP sebagai *nation branding* mereka?
- b. Bagaimana pengaruh penggunaan teknik *nation branding* dalam perbaikan citra Meksiko?

1.7.2.3 *Structural Violence*

Konsep struktural digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana kasus femisida yang terjadi di Meksiko menjadi wajar terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini terjadi dikarenakan faktor historis yang membuat budaya patriarki tertanam di masyarakat sehingga tindakan kekerasan terhadap wanita diwajarkan.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti berasumsi bahwa ketidaksesuaian tindakan pemerintah Meksiko dalam menangani isu femisida dengan FFP yang diadopsi oleh Meksiko dikarenakan banyaknya tantangan yang muncul dari dalam masyarakat. Tantangan yang muncul dari dalam masyarakat membuat pemerintah Meksiko kesulitan untuk menangani peningkatan kasus femisida.

1.9 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dimana peneliti mencari makna dari suatu fenomena atau peristiwa, dan dari temuan yang diperoleh peneliti menafsirkannya dalam bentuk deskripsi (Yusuf, 2014). Dalam menjelaskan fenomena di dalam penelitian, metode ini sendiri menjelaskannya dengan cara naratif.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian studi kasus yang merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendetail dan sistematis bisa mengenai orang, kejadian, atau kelompok (Yusuf, 2014: 339). Kasus dalam penelitian ini yaitu adanya isu kekerasan gender di Meksiko yang cukup tinggi ditandai dengan banyaknya perempuan yang menjadi korban atau disebut juga sebagai femisida.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan (Purwanza, 2022). Penelitian ini dalam bentuk *on-desk research*, yang dilakukan di kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial yang diteliti, dapat berupa aktor, tempat, dan aktivitas (Yusuf, 2014: 368). Subjek dari penelitian ini yaitu pemerintahan Meksiko dengan aktivitas pengadopsian kebijakan luar negeri feminis pada Januari 2020.

1.9.4 Jenis Data

Data penelitian merupakan informasi yang bisa terdapat pada berbagai hal yang menjadi bidang dan sasaran dari penelitian (Nugrahani, 2014). Data penelitian dapat berupa dua jenis yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yang merupakan data yang diambil dari pihak kedua atau tidak langsung dari sumbernya (Handayani, 2020).

1.9.5 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian atau fokus penelitian adalah batasan masalah dari sebuah penelitian, batasan ini dibuat bertujuan untuk membatasi variabel agar sasaran dari penelitian tidak terlalu luas (Purwanza, 2022). Berdasarkan rumusan masalah dan argumen yang ada, jangkauan dari penelitian ini yaitu berfokus kepada alasan dibalik tindakan pemerintah Meksiko yang tidak sesuai dalam menangani isu femisida dengan FFP yang telah diadopsi oleh Meksiko.

1.9.6 Sumber Data

Sumber data itu merupakan data-data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh bukti-bukti nyata (Rasjidi, 2019). Sumber data dari penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari website resmi pemerintahan Meksiko (*Gobierno De Mexico*) dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga seperti jurnal dan juga situs berita yang terpercaya.

1.9.7 Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, metode kualitatif sendiri pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu observasi, wawancara, dan sumber dari dokumen. Untuk penelitian ini sendiri, penulis menggunakan teknik *desk research* dimana data diperoleh dari dokumen seperti studi literatur atau kepustakaan.

1.9.8 Teknik analisis data

Dalam menganalisis penelitian ini, teknik analisis yang digunakan yaitu metode kongruen. Metode kongruen merupakan metode penelitian yang diawali dengan melihat teori yang digunakan dalam penelitian dan nantinya teori tersebut dicocokkan dengan data-data yang ditemukan selama proses penelitian. Melalui metode ini nantinya akan melihat hubungan antara varian dalam variable independen, bisa dalam bentuk deduktif atau generalisasi empiris. Proses dalam teknik ini yaitu pada awalnya yaitu memastikan nilai variable independen dalam topik atau kasus yang diteliti, kemudian menanyakan prediksi atau harapan dari hasil variabel dependen dari teori yang diambil. Apabila hasil kasus konsisten dengan prediksi teori, maka analisis tersebut dapat memperkirakan kemungkinan adanya hubungan sebab akibat (George & Bennett, 2005). Jadi, metode ini sendiri akan berfokus dalam mengambil kesimpulan dari hubungan atau relevansi antara teori dan data-data yang diperoleh selama proses penelitian (Mills, 2010).